



WELFARE

JURNAL ILMU EKONOMI

VOLUME 7 NOMOR 1 (MEI 2026)

<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>

ISSN 2723-2212 (MEDIA ONLINE)

ISSN 2723-2220 (MEDIA CETAK)

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTARKABUPATEN DI PROVINSI SULAWESI BARAT PERIODE 2015–2024

Rizki Abdillah Tanjung^{a*}, Sahrul Salam^b, Sudirman^c, Nurlaela^d, Astina^e

^{a,b,c,d,e}Universitas Sulawesi Barat, Majene, Sulawesi Barat, Indonesia

*rizki.abdillah@unsulbar.ac.id

Diterima: Februari 2026. **Disetujui:** April 2026. **Dipublikasikan:** Mei 2026.

ABSTRACT

This study aims to analyze development disparities among regencies, identify leading economic sectors, classify regional development levels, and examine the factors influencing regional economic development in West Sulawesi Province during the 2015–2024 period. The novelty of this study lies in the integration of multiple analytical approaches, including the measurement of regional development disparities using the Williamson Index and Theil Index, the identification of basic sectors through Location Quotient (LQ), regional classification using the Klassen Typology, and panel data regression analysis within a single regional development framework. This integrated approach provides a more comprehensive understanding of regional development conditions compared to previous studies, which generally employed only one or two analytical methods. The results indicate that development disparities among regencies in West Sulawesi Province fall within the moderate category and show a declining trend throughout the study period. Mamuju Regency is classified as an advanced and rapidly growing region, whereas Mamasa and Central Mamuju Regencies remain relatively underdeveloped. The panel data regression results reveal that the Human Development Index (HDI) has a positive and significant effect on regional economic development, while poverty and capital expenditure do not exhibit significant effects. The LQ analysis shows that the agricultural sector remains the primary basic sector in most regencies. The findings highlight that reducing regional development disparities requires policies that are tailored to regional characteristics, strengthen leading sectors, and enhance the quality of human resources.

Keywords: Regional Development Disparity, Regional Development, Klassen Typology, Location Quotient.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pembangunan antarkabupaten, mengidentifikasi sektor unggulan wilayah, mengklasifikasikan tingkat perkembangan daerah, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi wilayah di Provinsi Sulawesi Barat periode 2015–2024. Keunikan penelitian ini terletak pada integrasi analisis ketimpangan pembangunan menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Theil, identifikasi sektor basis menggunakan *Location Quotient* (LQ), klasifikasi wilayah melalui Tipologi Klassen, dan analisis regresi data panel dalam satu kerangka analisis pembangunan regional. Keunikan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan analisis yang terintegrasi keempat pendekatan tersebut memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi pembangunan regional dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya hanya menggunakan satu atau dua pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antarkabupaten di Provinsi Sulawesi Barat berada pada kategori sedang dengan kecenderungan menurun selama periode penelitian. Kabupaten Mamuju tergolong wilayah maju dan tumbuh cepat, sedangkan Mamasa dan Mamuju Tengah masih tergolong wilayah tertinggal. Hasil regresi panel menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi wilayah, sementara kemiskinan dan belanja modal belum menunjukkan

pengaruh signifikan. Analisis LQ menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor basis utama di sebagian besar kabupaten. Penelitian ini menegaskan bahwa pengurangan ketimpangan pembangunan memerlukan kebijakan berbasis karakteristik wilayah, penguatan sektor unggulan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kata Kunci: Ketimpangan Pembangunan, Pembangunan Wilayah, Tipologi Klassen, *Location Quotient*.

I. PENDAHULUAN

Ketimpangan pembangunan wilayah merupakan isu penting dalam kajian perencanaan pembangunan regional, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa urbanisasi dan konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah tertentu turut memperlebar disparitas pembangunan antardaerah (Tommy Firman, 2015). Pembangunan berbasis wilayah bertujuan meminimalisasi ketimpangan antarwilayah (Raafi'i et al., 2018). Ketidakmerataan pembangunan antarwilayah dapat menyebabkan munculnya perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat, ketimpangan akses terhadap sumber daya pembangunan, serta variasi pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Dalam perspektif ekonomi regional, ketimpangan pembangunan wilayah dipahami sebagai konsekuensi dari perbedaan struktur ekonomi, ketersediaan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan peran fungsional wilayah dalam sistem pembangunan nasional maupun regional (Azim et al., 2022). Ketimpangan antarwilayah juga dapat dijelaskan melalui mekanisme *cumulative causation*, di mana wilayah yang telah maju cenderung terus menarik sumber daya ekonomi dari wilayah yang tertinggal sehingga memperkuat disparitas spasial (Puspita et al., 2025). Literatur ketimpangan spasial menekankan bahwa perbedaan akses pasar dan aglomerasi ekonomi menjadi determinan utama dalam pembentukan ketimpangan wilayah (Hendarmin, 2019).

Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi dengan karakteristik wilayah yang beragam, baik secara geografis, demografis, maupun ekonomi. Sebagai provinsi dengan tingkat pembangunan yang masih berkembang, pencapaian pembangunan antarkabupaten di Sulawesi Barat menunjukkan variasi yang signifikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan Produk Domestik Bruto (PDRB) wilayah, populasi, dan PDRB per kapita di berbagai kabupaten dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perbedaan dalam kinerja pembangunan ekonomi. Kabupaten yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan umumnya menunjukkan dinamika kegiatan ekonomi yang lebih berkembang dibandingkan daerah yang masih didominasi kawasan perdesaan serta memiliki keterbatasan aksesibilitas wilayah. (Andari, 2020).

Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Sulawesi Barat dapat diamati dari variasi tingkat pendapatan regional antarkabupaten. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2024 nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antarkabupaten masih menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Kabupaten Pasangkayu memiliki PDRB per kapita sekitar Rp39,13 juta, diikuti Kabupaten Mamuju sebesar Rp32,22 juta, sedangkan Kabupaten Majene dan Polewali Mandar masing-masing berada pada kisaran Rp22,21 juta dan Rp21,55 juta. Di sisi lain, beberapa wilayah seperti Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamasa memiliki tingkat PDRB per kapita yang relatif lebih rendah, yaitu sekitar Rp17,01 juta dan Rp14,17 juta. Perbedaan tingkat pendapatan regional tersebut mencerminkan adanya variasi kapasitas ekonomi antarwilayah yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah, tingkat aksesibilitas, serta konsentrasi aktivitas ekonomi pada wilayah tertentu (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2025).

Selain perbedaan tingkat pendapatan, ketimpangan pembangunan juga terlihat dari skala aktivitas ekonomi antarkabupaten. Pada tahun 2024 total PDRB Provinsi Sulawesi Barat tercatat sekitar Rp37,3 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Polewali Mandar sekitar Rp10,80 triliun dan

Kabupaten Mamuju sekitar Rp9,57 triliun, sementara beberapa wilayah lain seperti Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju Tengah memiliki nilai PDRB yang jauh lebih kecil, masing-masing sekitar Rp2,45 triliun dan Rp2,47 triliun. Ketimpangan kemampuan produksi antarwilayah mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi daerah belum tersebar secara merata dan masih lebih dominan berkembang pada wilayah-wilayah tertentu.

Dalam perspektif pembangunan regional, konsentrasi ekonomi seperti ini berpotensi memperkuat disparitas spasial apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pembangunan yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi wilayah yang relatif tertinggal (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2025).

Periode 2015–2024 merupakan rentang waktu yang relevan untuk dianalisis karena mencerminkan dinamika pembangunan wilayah dalam jangka menengah, yang mencakup fase sebelum pandemi COVID-19, masa pandemi, serta periode pemulihan pasca pandemi. Analisis pada periode ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola dan kecenderungan ketimpangan pembangunan antarkabupaten, tidak hanya sebagai potret kondisi sesaat, tetapi sebagai bagian dari proses pembangunan wilayah yang bersifat dinamis. Dalam kajian empiris pembangunan wilayah di Indonesia, pengukuran ketimpangan antardaerah umumnya dilakukan melalui pendekatan Indeks Williamson dan Indeks Theil yang digunakan untuk melihat tingkat ketimpangan antarkabupaten. Selain itu, klasifikasi posisi perkembangan wilayah dianalisis menggunakan Tipologi Klassen berdasarkan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita masing-masing daerah (Mallarangang, 2018).

Meskipun pendekatan ini telah banyak digunakan, kajian yang secara khusus menerapkannya pada tingkat kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dengan cakupan periode jangka menengah masih relatif terbatas, terutama yang mengombinasikan pengukuran ketimpangan dan klasifikasi

wilayah secara simultan. Beberapa studi di Indonesia telah mengukur ketimpangan antarkabupaten/kota menggunakan Indeks Williamson, namun sebagian besar masih berfokus pada level provinsi dan periode terbatas. Dalam konteks Provinsi Sulawesi Barat, kajian empiris yang secara khusus menganalisis ketimpangan pembangunan antarkabupaten dengan menggunakan kombinasi Indeks Williamson, Indeks Theil (T), dan Tipologi Klassen pada periode 2015–2024, regresi data panel dan *location quotient* (LQ) masih relatif jarang ditemukan. Padahal, pendekatan kombinasi tersebut penting untuk tidak hanya mengukur tingkat ketimpangan, tetapi juga mengidentifikasi pola dan karakter pembangunan wilayah secara lebih komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk: (1) menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan antarkabupaten di Provinsi Sulawesi Barat menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Theil; (2) mengklasifikasikan tingkat perkembangan wilayah menggunakan Tipologi Klassen; (3) menganalisis pengaruh kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan belanja modal terhadap pembangunan ekonomi wilayah yang diproksikan melalui PDRB per kapita menggunakan regresi data panel; ; serta (4) mengidentifikasi sektor basis dan sektor unggulan daerah menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ).

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai ketimpangan pembangunan wilayah serta menjadi dasar analitis bagi perencanaan pembangunan wilayah yang lebih berorientasi pada pemerataan. Dalam perspektif perencanaan regional, ketimpangan wilayah merupakan indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas distribusi pembangunan dan alokasi sumber daya (Glasson, 1974). Penelitian terdahulu umumnya hanya menggunakan satu pendekatan analisis ketimpangan, seperti Indeks Williamson atau Tipologi Klassen secara terpisah. Penelitian ini menawarkan pendekatan integratif dengan mengombinasikan Indeks Williamson, Indeks

Theil, Tipologi Klassen, Regresi Data Panel, dan *Location Quotient* sehingga mampu menjelaskan ketimpangan pembangunan tidak hanya dari sisi tingkat disparitas, tetapi juga faktor determinan dan struktur ekonomi wilayah secara simultan.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, meliputi data PDRB menurut lapangan usaha, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, dan belanja modal pemerintah daerah periode 2015–2024.

B. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, yang meliputi seluruh kabupaten yang tercatat secara administratif selama periode pengamatan.

C. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan beberapa alat analisis ketimpangan pembangunan wilayah, yaitu Indeks Williamson, Indeks Theil, dan Tipologi Klassen, regresi data panel dan analisis struktur ekonomi wilayah (LQ).

1. Indeks Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antarkabupaten berdasarkan PDRB per kapita dengan mempertimbangkan jumlah penduduk. Rumus Indeks Williamson:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n f_i (Y_i - \bar{Y})^2 / N}}{\bar{Y}}$$

Keterangan:

IW = Indeks Williamson

Y_i = PDRB per kapita kabupaten ke- i

$\bar{Y}$ = Rata-rata PDRB per kapita provinsi

f_i = Jumlah penduduk kabupaten ke- i

N = Jumlah penduduk provinsi

n = Jumlah kabupaten

Dalam penelitian ini, interpretasi tingkat ketimpangan pembangunan didasarkan pada nilai empiris Indeks Williamson yang umum

digunakan dalam studi pembangunan wilayah di Indonesia. Semakin kecil nilai indeks atau semakin dekat ke angka nol, maka tingkat ketimpangan antarwilayah cenderung semakin rendah. Sebaliknya, apabila nilai indeks bergerak mendekati angka satu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah semakin tinggi.

Berdasarkan praktik empiris pada kajian tingkat provinsi, nilai Indeks Williamson di bawah 0,5 umumnya diinterpretasikan sebagai ketimpangan kategori rendah hingga sedang. Oleh karena itu, klasifikasi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan interpretasi relatif tersebut.

2. Indeks Theil

Indeks Theil digunakan sebagai alat analisis tambahan untuk mengukur ketimpangan pembangunan yang lebih sensitif terhadap perbedaan ekstrem antarwilayah.

$$T = \sum_{i=1}^n \left(\frac{Y_i}{\sum Y_i} \right) \ln \left(\frac{Y_i/P_i}{\bar{Y}} \right)$$

Keterangan:

T = Indeks Theil

Y_i = PDRB kabupaten ke- i

P_i = Jumlah penduduk kabupaten ke- i

$\bar{Y}$ = Rata-rata PDRB per kapita provinsi

Nilai indeks Theil yang semakin besar menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan wilayah yang semakin tinggi.

3. Tipologi Klassen

Tipologi Klassen digunakan untuk mengklasifikasikan kabupaten berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat PDRB per kapita relatif terhadap rata-rata provinsi. Beberapa studi menunjukkan bahwa klasifikasi wilayah melalui Tipologi Klassen dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi relatif suatu daerah dalam struktur pembangunan regional (Arifin, 2009). Kriteria Tipologi Klassen:

Tabel 1. Kuadran Tipologi Klassen

Kuadran	Kriteria	Klasifikasi Wilayah
I	Pertumbuhan > rata-rata provinsi dan PDRB per kapita > rata-rata provinsi	Wilayah maju dan tumbuh cepat
II	Pertumbuhan < rata-rata provinsi dan PDRB per kapita > rata-rata provinsi	Wilayah berkembang

III	Pertumbuhan > rata-rata provinsi dan PDRB per kapita < rata-rata provinsi	Wilayah potensial tertinggal
IV	Pertumbuhan < rata-rata provinsi dan PDRB per kapita < rata-rata provinsi	Wilayah tertinggal

Sumber: (Syafrizal, 2008)

4. Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pembangunan antarkabupaten di Provinsi Sulawesi Barat selama periode 2015–2024. Data panel merupakan kombinasi antara data *time series* dan *cross section* (Madany & Rais, 2022) sehingga mampu menangkap dinamika perubahan antar waktu dan karakteristik masing-masing wilayah.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah PDRB per kapita, sedangkan variabel independen meliputi tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan belanja modal pemerintah daerah. Model regresi data panel dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\ln Y_{it} = \alpha + \beta_1 KM_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 \ln BM_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots \text{Persamaan 1}$$

Model estimasi yang digunakan meliputi *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji *Lagrange Multiplier* (LM) (Azalia, 2026).

5. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi sektor basis dan sektor non basis pada masing-masing kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Metode ini membandingkan kontribusi suatu sektor terhadap PDRB kabupaten dengan kontribusi sektor yang sama terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat.

Rumus LQ yang digunakan adalah:

$$LQ = \frac{(S_i/S)}{(N_i/N)}$$

Keterangan:
Si = PDRB sektor i pada tingkat kabupaten
S = Total PDRB kabupaten
Ni = PDRB sektor i pada tingkat provinsi
N = Total PDRB provinsi

dengan kriteria interpretasi:
LQ > 1 Sektor basis atau sektor unggulan yang memiliki tingkat spesialisasi lebih tinggi dibandingkan tingkat provinsi.
LQ = 1 Sektor memiliki kontribusi yang relatif sama dengan tingkat provinsi.
LQ < 1 Sektor non basis yang kontribusinya lebih kecil dibandingkan tingkat provinsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Pengukuran Ketimpangan Pembangunan Antarkabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

Pengukuran ketimpangan pembangunan antarkabupaten di Provinsi Sulawesi Barat periode 2015–2024 dilakukan menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Theil (T) yang mampu menggambarkan distribusi aktivitas ekonomi antarwilayah secara lebih komprehensif (Mallarangang, 2018). Hasil perhitungan disajikan pada Tabel 2.

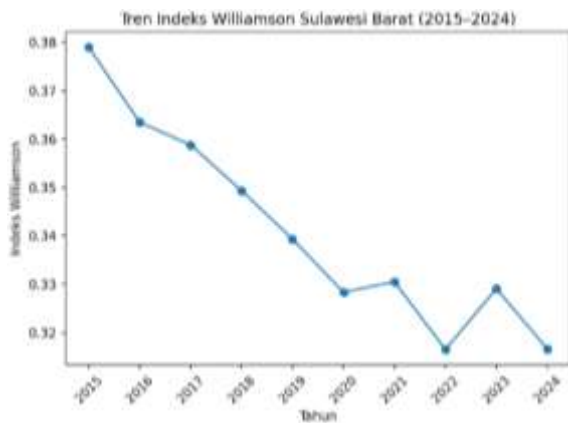
Tabel 2. Indeks Ketimpangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015–2024

Tahun	Indeks Williamson	Indeks Theil (T)
2015	0,379	0,064
2016	0,363	0,060
2017	0,359	0,059
2018	0,349	0,056
2019	0,339	0,053
2020	0,328	0,051
2021	0,330	0,052
2022	0,317	0,048
2023	0,329	0,052
2024	0,317	0,049

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015–2024), data diolah

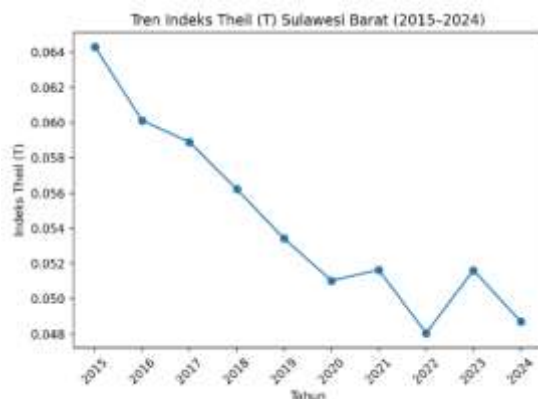
Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Theil (T), ketimpangan pembangunan berada pada kategori sedang dengan kecenderungan menurun dalam jangka menengah. Nilai Indeks Williamson yang berada pada kisaran 0,317 hingga 0,379 mengindikasikan bahwa meskipun terdapat perbedaan tingkat pendapatan antarwilayah, ketimpangan tersebut tidak berada pada tingkat yang sangat tinggi. Penurunan nilai indeks yang relatif konsisten dari tahun 2015 hingga 2020 menunjukkan adanya proses pemerataan pembangunan ekonomi secara bertahap antarkabupaten. Kondisi ini mengindikasikan

bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di beberapa wilayah mulai diikuti oleh peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah lainnya. Dalam kajian pembangunan regional, kecenderungan penurunan ketimpangan ini sering diinterpretasikan sebagai indikasi awal dari proses konvergensi ekonomi antarwilayah, yaitu kondisi di mana wilayah dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih cepat dibandingkan wilayah yang telah lebih maju (Arsyanti & Nugrahadi, 2021).



Gambar 1. Tren Indeks Williamson

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015-2024), data diolah



Gambar 2. Tren Indeks Theil (T)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015-2024), data diolah

Kedua diagram menunjukkan hasil perhitungan Indeks Theil menunjukkan pola yang relatif konsisten dengan Indeks Williamson. Nilai indeks Theil yang berada pada kisaran 0,048 hingga 0,064 menunjukkan tren penurunan ketimpangan yang konsisten. Hal ini mengkonfirmasi bahwa distribusi pendapatan antarkabupaten di Sulawesi Barat bergerak menuju pemerataan. Indeks Theil dikenal memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap

perbedaan ekstrem antarwilayah, sehingga penggunaan indeks ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai distribusi pendapatan regional (Hidayadi & Niam, 2022).

Konsistensi pola pergerakan kedua indeks tersebut memperkuat validitas hasil pengukuran ketimpangan pembangunan antarkabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

Secara umum, tren penurunan ketimpangan tersebut dapat dikaitkan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan daerah serta perbaikan infrastruktur ekonomi di beberapa wilayah. Infrastruktur transportasi dan konektivitas wilayah diketahui memiliki peran penting dalam mendorong integrasi ekonomi antardaerah serta meningkatkan mobilitas faktor produksi (Zaman, 2024). Beberapa studi menunjukkan bahwa peningkatan infrastruktur dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah dan pada saat yang sama mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah (Fitriani & Hukmi, 2025).

Namun demikian, dinamika ketimpangan yang terjadi tidak sepenuhnya bersifat linear. Fluktuasi nilai indeks pada tahun 2021 dan 2023 menunjukkan bahwa proses pemerataan pembangunan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Salah satu faktor yang dapat menjelaskan fenomena tersebut adalah dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Gangguan terhadap aktivitas produksi, perdagangan, serta mobilitas tenaga kerja menyebabkan kinerja ekonomi daerah mengalami tekanan yang berbeda antarwilayah. Wilayah dengan struktur ekonomi yang beragam umumnya memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam menghadapi perubahan ekonomi dibandingkan daerah yang aktivitas ekonominya masih terfokus pada satu sektor tertentu. (Goschin, 2019). Dengan demikian, hasil analisis indeks ketimpangan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kecenderungan perbaikan distribusi pembangunan antarwilayah, disparitas ekonomi antarkabupaten di Provinsi Sulawesi Barat masih menjadi karakteristik penting dalam struktur pembangunan regional.

2. Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Tipologi Klassen

Selain melihat dinamika ketimpangan secara agregat, analisis juga dilakukan untuk mengidentifikasi posisi relatif masing-masing

kabupaten dalam struktur pembangunan regional melalui pendekatan Tipologi Klassen.

Tabel 3. Indeks Ketimpangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015–2024

Kabupaten	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten (r _i) %	Rata-rata Pertumbuhan Provinsi (r) %	PDRB per Kapita Kabupaten (y _i) Juta Rp	Rata-rata PDRB per Kapita Provinsi (y) Juta Rp	Klasifikasi
Mamuju	4,45	3,92	32,22	24,38	Kuadran I
Pasangkayu	3,13	3,92	39,13	24,38	Kuadran II
Majene	4,19	3,92	22,21	24,38	Kuadran III
Polewali Mandar	4,52	3,92	21,55	24,38	Kuadran III
Mamasa	3,74	3,92	14,17	24,38	Kuadran IV
Mamuju Tengah	3,49	3,92	17,01	24,38	Kuadran IV

Sumber: Hasil Olah Data, 2026

Penentuan Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten (r_i) terhadap rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat (r), serta membandingkan PDRB per kapita kabupaten (y_i) terhadap rata-rata PDRB per kapita provinsi (y).

Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda, yang tercermin dari perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Kabupaten Mamuju yang berada pada kategori wilayah maju dan tumbuh cepat menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Sebagai pusat pemerintahan provinsi dan pusat aktivitas ekonomi regional, Kabupaten Mamuju memiliki keunggulan dalam hal akses terhadap infrastruktur, layanan publik, serta jaringan perdagangan. Keberadaan fungsi administratif dan pelayanan publik di wilayah ini mendorong konsentrasi aktivitas ekonomi yang lebih besar (Yusuf et al., 2025).

Kabupaten Pasangkayu tergolong dalam Kuadran II (wilayah berkembang), menunjukkan karakteristik wilayah dengan tingkat pendapatan relatif tinggi namun laju pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Kondisi ini dapat mencerminkan struktur ekonomi wilayah yang telah berkembang pada sektor tertentu, namun mengalami perlambatan dalam ekspansi ekonomi.

Sementara itu, Kabupaten Majene dan Polewali Mandar berada pada Kuadran III (wilayah potensial tertinggal). Hal tersebut mengindikasikan bahwa wilayah tersebut mengalami perkembangan pertumbuhan ekonomi yang cukup positif, meskipun tingkat pendapatan masyarakatnya masih berada di bawah rata-rata pendapatan provinsi. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila pertumbuhan ekonomi dapat diikuti oleh peningkatan produktivitas sektor ekonomi lokal diversifikasi usaha, adopsi teknologi, dan pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata (Manik et al., 2023).

Adapun Kabupaten Mamasa dan Mamuju Tengah tergolong dalam Kuadran IV (wilayah tertinggal) menunjukkan bahwa kedua wilayah tersebut masih menghadapi keterbatasan dalam hal kapasitas ekonomi dan tingkat pertumbuhan. Dalam konteks pembangunan wilayah, kondisi ini umumnya berkaitan dengan keterbatasan aksesibilitas wilayah, rendahnya tingkat investasi, serta keterbatasan infrastruktur ekonomi yang mendukung aktivitas produksi dan perdagangan.

Perbedaan tingkat pembangunan antarwilayah tersebut merupakan fenomena yang umum dalam proses pembangunan regional. Studi empiris menunjukkan bahwa konsentrasi aktivitas ekonomi pada wilayah tertentu dapat menyebabkan terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki tingkat perkembangan ekonomi lebih cepat

dibandingkan wilayah lainnya (McCann, 2022). Oleh karena itu, strategi pembangunan wilayah yang efektif perlu mempertimbangkan karakteristik dan potensi ekonomi masing-masing daerah (Susilowati & Putri, 2024), agar proses pembangunan dapat berlangsung secara lebih seimbang.

3. Model Regresi Panel

Sebelum menentukan model regresi panel terbaik, dilakukan serangkaian pengujian untuk memilih model yang paling sesuai, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Tahapan pengujian meliputi uji Chow, uji Hausman, dan uji *Lagrange Multiplier* (LM).

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik dibandingkan *Common Effect Model* (CEM), dengan kriteria pengujian:

- Jika probabilitas *Cross-section F* $< 0,05$ maka FEM lebih tepat digunakan.
- Jika probabilitas $> 0,05$ maka CEM lebih tepat digunakan.

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Pengujian	Nilai Statistik	Probabilitas	Keputusan
<i>Cross-section F</i>	18,742	0,0000	FEM lebih tepat dibandingkan CEM
<i>Cross-section Chi-square</i>	72,531	0,0000	Tolak H0

Sumber: Hasil Olah Data, 2026

Hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$ sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah model FEM atau REM yang paling sesuai, dengan kriteria pengujian:

- Jika probabilitas $< 0,05$ maka FEM dipilih.
- Jika probabilitas $> 0,05$ maka REM dipilih.

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

Pengujian	Nilai Statistik	df	Probabilitas	Keputusan
<i>Cross-section Random</i>	14,286	3	0,0026	FEM lebih tepat dibandingkan REM

Sumber: Hasil Olah Data, 2026

Hasil uji Hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0026 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) lebih sesuai digunakan dibandingkan *Random Effect Model* (REM).

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji LM digunakan untuk membandingkan *Common Effect Model* (CEM) dengan *Random Effect Model* (REM).

Tabel 6. Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

Pengujian	Nilai Statistik	Probabilitas	Keputusan
<i>Breusch-Pagan LM</i>	21,447	0,0000	REM lebih tepat dibandingkan CEM

Sumber: Hasil Olah Data, 2026

Hasil uji LM menunjukkan bahwa model REM lebih baik dibandingkan CEM. Namun berdasarkan hasil uji Hausman, model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Dengan demikian, model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan hasil olah data dalam model regresi panel, hasilnya menunjukkan bahwa model yang paling relevan adalah pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) karena mampu menangkap karakteristik khusus masing-masing kabupaten.

Tabel 7. Hasil Regresi Panel (FEM)

Variabel	Koefisien	Probabilitas	Keterangan
Kemiskinan	-0,0048	0,198	Tidak signifikan
IPM	0,0330	0,000	Signifikan positif
Ln Belanja Modal	0,0186	0,456	Tidak signifikan

Sumber: Hasil Olah Data, 2026

Tabel 8. Goodness of Fit

Indikator	Nilai
<i>R-squared</i>	0,989
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,000

Sumber: Hasil Olah Data, 2026

Variabel IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita. Artinya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat mampu meningkatkan kinerja ekonomi wilayah. Koefisien sebesar 0,033 menunjukkan bahwa kenaikan IPM sebesar 1 poin meningkatkan PDRB per kapita sekitar 3,3%.

Koefisien kemiskinan bernilai negatif sesuai teori. Artinya semakin tinggi tingkat kemiskinan, maka kecenderungan PDRB per kapita menurun. Namun pengaruhnya belum signifikan secara statistik. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan struktur ekonomi antarkabupaten, dominasi sektor primer, serta variasi tingkat produktivitas wilayah.

Belanja modal memiliki arah positif. Artinya peningkatan investasi pemerintah daerah cenderung meningkatkan aktivitas ekonomi wilayah. Namun pengaruhnya belum signifikan. Kemungkinan disebabkan efek pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu jangka panjang, atau belanja modal belum sepenuhnya produktif.

4. Analisis Struktur Ekonomi Wilayah

Hasil analisis *Location Quotient* (LQ) sektor basis dapat di lihat pada tabel 6.

Tabel 9. Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) Sektor Basis Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

Kabupaten	Sektor Unggulan	Nilai LQ	Keterangan
Majene	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,84	Sektor basis
Majene	Administrasi Pemerintahan	1,36	Sektor basis
Polewali Mandar	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,72	Sektor basis
Polewali Mandar	Perdagangan Besar dan Eceran	1,21	Sektor basis
Mamasa	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,11	Sektor basis dominan
Mamuju	Administrasi Pemerintahan	1,48	Sektor basis
Mamuju	Konstruksi	1,29	Sektor basis

Pasangkayu	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,67	Sektor basis
Pasangkayu	Industri Pengolahan	1,54	Sektor basis
Mamuju Tengah	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,93	Sektor basis

Sumber: Hasil Olah Data, 2026

Hasil analisis *Location Quotient* (LQ) menunjukkan bahwa setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat memiliki karakteristik sektor unggulan yang berbeda-beda sesuai dengan potensi ekonomi daerah masing-masing. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi sektor basis dominan di sebagian besar kabupaten, yang menunjukkan bahwa struktur ekonomi regional masih bertumpu pada aktivitas sektor primer. Selain itu, beberapa kabupaten juga menunjukkan keunggulan pada sektor perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, dan administrasi pemerintahan yang mencerminkan adanya variasi tingkat perkembangan ekonomi antarwilayah.

B. Pembahasan

1. Tingkat Ketimpangan Pembangunan Antarkabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

Analisis tingkat ketimpangan pembangunan antarkabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dalam penelitian ini menggunakan Indeks Williamson sebagai alat ukur disparitas regional. Penggunaan Indeks Williamson didasarkan pada teori pembangunan wilayah yang dikemukakan oleh Williamson yang menyatakan bahwa perbedaan tingkat pembangunan antarwilayah dapat diukur melalui variasi pendapatan regional per kapita. Semakin kecil nilai indeks mendekati nol menunjukkan pembangunan yang semakin merata, sedangkan nilai yang semakin mendekati satu menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Dalam berbagai penelitian ekonomi regional di Indonesia, klasifikasi tingkat ketimpangan umumnya dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu ketimpangan rendah apabila nilai indeks berada di bawah 0,3, ketimpangan sedang pada kisaran 0,3–0,5, dan ketimpangan tinggi apabila nilai indeks berada di atas 0,5 (Maharani, 2025). Klasifikasi tersebut banyak

digunakan dalam penelitian pembangunan wilayah karena mampu memberikan interpretasi operasional terhadap tingkat disparitas ekonomi antardaerah.

Berdasarkan hasil analisis, tingkat ketimpangan pembangunan antarkabupaten di Provinsi Sulawesi Barat selama periode penelitian secara umum berada pada kategori sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi aktivitas ekonomi dan hasil pembangunan antarwilayah masih belum sepenuhnya merata. Kabupaten yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi lebih tinggi cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan kabupaten yang masih didominasi oleh sektor primer tradisional dengan produktivitas relatif rendah, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Saskia, 2026) yang mengatakan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi, seperti industri manufaktur dan jasa modern. Sementara itu, sebagian masyarakat masih bekerja pada sektor tradisional dengan tingkat produktivitas yang relatif lebih rendah. Kondisi ini menyebabkan manfaat pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kabupaten Mamuju menunjukkan tingkat pembangunan yang relatif lebih maju dibandingkan kabupaten lainnya karena didukung oleh fungsi administratif sebagai ibu kota provinsi serta berkembangnya sektor jasa, perdagangan, dan konstruksi. Kondisi tersebut menyebabkan konsentrasi aktivitas ekonomi lebih besar dibandingkan wilayah lainnya sehingga berkontribusi terhadap meningkatnya disparitas pembangunan regional.

Berdasarkan karakteristik tersebut, Kabupaten Mamuju dapat dikategorikan sebagai wilayah dengan tingkat ketimpangan relatif tinggi dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat. Temuan ini sejalan dengan teori pusat pertumbuhan (*growth pole theory*) yang dikemukakan oleh Perroux, yang menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi cenderung terkonsentrasi pada wilayah

tertentu yang memiliki fasilitas pembangunan dan infrastruktur lebih baik sehingga memicu ketimpangan antarwilayah di sekitarnya (Vidriza et al., 2026).

Kabupaten Pasangkayu juga menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif tinggi karena memiliki sektor unggulan berbasis perkebunan dan industri pengolahan yang berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya. Tingginya aktivitas ekonomi pada sektor perkebunan kelapa sawit dan industri terkait menyebabkan peningkatan pendapatan regional yang relatif lebih besar dibandingkan kabupaten lain. Kondisi ini memperlihatkan bahwa daerah dengan sektor basis yang kuat cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi lebih cepat sehingga dapat memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Akita dan Lukman mengenai disparitas regional di Indonesia yang menunjukkan bahwa konsentrasi sektor unggulan dan investasi pada wilayah tertentu dapat mendorong peningkatan ketimpangan pembangunan regional.

Sementara itu, Kabupaten Majene dan Polewali Mandar menunjukkan tingkat ketimpangan pada kategori sedang. Kedua wilayah tersebut memiliki aktivitas ekonomi yang relatif berkembang, terutama pada sektor pertanian dan perdagangan, namun tingkat diversifikasi ekonominya belum sekuat kabupaten dengan sektor jasa dan industri yang dominan. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi wilayah berlangsung lebih moderat sehingga tingkat disparitas pembangunan relatif berada pada kategori menengah. Temuan ini mendukung pandangan Kuncoro yang menyatakan bahwa ketimpangan pembangunan regional pada daerah berkembang umumnya dipengaruhi oleh perbedaan struktur ekonomi dan konsentrasi aktivitas ekonomi antarwilayah.

Kabupaten Mamasa dan Mamuju Tengah menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif rendah dibandingkan kabupaten lainnya. Hal ini disebabkan oleh struktur ekonomi wilayah yang masih didominasi sektor pertanian tradisional dengan tingkat aktivitas ekonomi yang relatif homogen. Rendahnya konsentrasi sektor modern dan

terbatasnya aktivitas industri menyebabkan distribusi pendapatan regional antar masyarakat relatif lebih merata, meskipun pada tingkat kapasitas ekonomi yang masih rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya ketimpangan tidak selalu mencerminkan tingginya tingkat kesejahteraan wilayah, tetapi juga dapat menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih berkembang secara terbatas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan struktur ekonomi, konsentrasi sektor unggulan, dan kapasitas pembangunan antarkabupaten menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten yang memiliki sektor basis lebih maju dan aktivitas ekonomi yang lebih terdiversifikasi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan wilayah yang masih bergantung pada sektor primer tradisional. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah perlu diarahkan pada pemerataan investasi, penguatan konektivitas wilayah, serta pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal agar proses pembangunan ekonomi antarkabupaten dapat berlangsung lebih seimbang dan berkelanjutan.

2. Klasifikasikan Kabupaten Berdasarkan Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen menunjukkan bahwa struktur pembangunan antarkabupaten di Provinsi Sulawesi Barat masih bersifat heterogen. Setiap kabupaten memiliki karakteristik pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang berbeda, sehingga menghasilkan klasifikasi wilayah yang beragam dalam empat kuadran pembangunan. Kabupaten Mamuju yang berada pada Kuadran I menunjukkan karakteristik wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi serta PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Posisi ini menggambarkan peran wilayah tersebut sebagai pusat pertumbuhan regional yang memiliki kapasitas ekonomi relatif lebih kuat.

Kabupaten Pasangkayu yang berada pada Kuadran II menunjukkan kondisi wilayah dengan tingkat pendapatan relatif tinggi namun pertumbuhan ekonomi yang lebih

rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa struktur ekonomi wilayah tersebut telah mencapai tingkat perkembangan tertentu, namun mengalami perlambatan dalam laju ekspansi ekonomi. Sementara itu, Kabupaten Majene dan Polewali Mandar yang berada pada Kuadran III mencerminkan wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi namun masih memiliki tingkat pendapatan yang relatif rendah.

Kondisi ini menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor ekonomi yang berkembang. Kabupaten Mamasa dan Mamuju Tengah yang berada pada Kuadran IV menunjukkan karakteristik wilayah yang masih menghadapi tantangan pembangunan yang cukup besar. Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi serta PDRB per kapita menunjukkan bahwa wilayah tersebut memerlukan dukungan pembangunan yang lebih intensif, khususnya dalam peningkatan infrastruktur, pengembangan sektor ekonomi produktif, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Beberapa studi menemukan bahwa wilayah dengan akses infrastruktur dan aktivitas ekonomi yang lebih berkembang cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan wilayah dengan keterbatasan aksesibilitas dan kapasitas ekonomi yang lebih rendah (Azim et al., 2022).

3. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembangunan Ekonomi Wilayah

Analisis regresi data panel dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi wilayah antarkabupaten di Provinsi Sulawesi Barat selama periode 2015–2024. Pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) digunakan karena mampu menangkap karakteristik spesifik masing-masing kabupaten yang tidak dapat diamati secara langsung namun memengaruhi dinamika pembangunan wilayah. Variabel yang dianalisis meliputi tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan belanja modal pemerintah daerah terhadap PDRB per kapita sebagai indikator pembangunan ekonomi regional.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi wilayah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia berperan penting dalam mendorong peningkatan kapasitas ekonomi daerah. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Alfayed et al., 2025) yang mengatakan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat krusial dalam mempercepat produktivitas tenaga kerja, daya saing daerah, dan inovasi. SDM yang unggul mampu mengelola potensi lokal secara optimal, menciptakan nilai tambah pada sektor UMKM, serta menarik investasi.

Dalam perspektif pembangunan regional, kualitas sumber daya manusia yang tercermin melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak merupakan faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja dan kemampuan masyarakat dalam mengakses aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Wilayah dengan tingkat IPM yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan adaptasi ekonomi yang lebih baik, tingkat produktivitas yang lebih tinggi, serta daya saing ekonomi yang lebih kuat dibandingkan wilayah dengan kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah.

Temuan tersebut sejalan dengan teori pembangunan endogen yang menempatkan modal manusia sebagai faktor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Sinaga et al., 2025). Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dapat memperkuat kapasitas produksi regional, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi daerah. Dalam konteks pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Barat, hasil ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan ketimpangan pembangunan tidak hanya bergantung pada peningkatan aktivitas ekonomi secara agregat, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara lebih merata antarwilayah.

Sementara itu, variabel kemiskinan menunjukkan pengaruh negatif terhadap pembangunan ekonomi wilayah, meskipun secara statistik belum signifikan. Arah

hubungan negatif tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat kemiskinan cenderung berkaitan dengan penurunan kapasitas ekonomi daerah. Kondisi ini dapat dijelaskan karena tingginya tingkat kemiskinan umumnya berkaitan dengan rendahnya produktivitas tenaga kerja, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi. Namun demikian, ketidaksignifikanan variabel ini menunjukkan bahwa pengaruh kemiskinan terhadap pembangunan ekonomi antarkabupaten masih dipengaruhi oleh faktor struktural lain, seperti karakteristik sektor ekonomi daerah, tingkat urbanisasi, dan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Variabel belanja modal pemerintah daerah juga menunjukkan hubungan positif terhadap pembangunan ekonomi wilayah, namun belum signifikan secara statistik. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal cenderung mendorong peningkatan aktivitas ekonomi regional, meskipun dampaknya belum terlihat secara langsung dalam jangka pendek. Dalam kajian pembangunan wilayah, belanja modal pemerintah umumnya diarahkan pada pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, fasilitas pelayanan dasar, dan sarana ekonomi lainnya yang berfungsi meningkatkan konektivitas wilayah dan efisiensi aktivitas ekonomi. Akan tetapi, dampak pembangunan infrastruktur biasanya bersifat jangka panjang sehingga pengaruhnya terhadap peningkatan pembangunan ekonomi daerah tidak selalu dapat diamati secara langsung dalam periode pengamatan yang relatif terbatas.

Selain itu, efektivitas belanja modal juga dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan anggaran daerah, ketepatan sasaran pembangunan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan keterkaitan antara pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi produktif. Dalam beberapa wilayah, peningkatan belanja modal belum sepenuhnya mampu menciptakan efek pengganda ekonomi yang kuat karena masih terkonsentrasi pada

pembangunan fisik yang belum secara optimal terintegrasi dengan pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

Secara umum, hasil regresi panel menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia merupakan faktor yang paling konsisten memengaruhi pembangunan ekonomi wilayah di Provinsi Sulawesi Barat. Temuan ini menegaskan bahwa strategi pengurangan ketimpangan pembangunan antarwilayah perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan investasi fisik dan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan kapasitas masyarakat secara lebih merata antarkabupaten.

4. Analisis Struktur Ekonomi Wilayah

Analisis struktur ekonomi wilayah dilakukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang menjadi basis perekonomian pada masing-masing kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam penelitian ini, analisis struktur ekonomi wilayah dilakukan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi tingkat konsentrasi atau spesialisasi suatu sektor ekonomi pada suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas sebagai daerah acuan yaitu Provinsi Sulawesi Barat. Melalui pendekatan tersebut, dapat diketahui sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan berperan sebagai sektor basis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa struktur ekonomi antarkabupaten di Provinsi Sulawesi Barat masih didominasi oleh sektor primer, khususnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sebagian besar kabupaten memiliki nilai LQ lebih besar dari satu pada sektor tersebut, yang mengindikasikan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor basis utama dalam aktivitas ekonomi regional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi wilayah di Provinsi Sulawesi Barat masih sangat bergantung pada pemanfaatan sumber

daya alam dan aktivitas agraris sebagai sumber utama pendapatan masyarakat.

Dominasi sektor pertanian sebagai sektor basis mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat di sebagian besar wilayah masih terkonsentrasi pada kegiatan produksi primer seperti perkebunan, tanaman pangan, peternakan, dan perikanan. Sektor ini memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat pedesaan, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Haryana, 2026) yang mengatakan sektor pangan dan perkebunan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi, ketergantungan yang tinggi terhadap sektor primer juga menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah belum sepenuhnya mengalami transformasi menuju sektor-sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi seperti industri pengolahan dan jasa modern.

Selain sektor pertanian, beberapa kabupaten juga menunjukkan keunggulan pada sektor lain yang mencerminkan karakteristik ekonomi wilayah masing-masing. Kabupaten Mamuju memiliki sektor basis pada administrasi pemerintahan dan konstruksi yang menunjukkan perannya sebagai pusat pemerintahan provinsi dan pusat pelayanan regional. Keberadaan aktivitas pemerintahan dan pembangunan infrastruktur yang relatif lebih tinggi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sektor jasa dan aktivitas ekonomi perkotaan. Sementara itu, Kabupaten Pasangkayu menunjukkan keunggulan pada sektor industri pengolahan yang berkaitan dengan berkembangnya aktivitas perkebunan dan pengolahan komoditas unggulan daerah.

Perbedaan struktur ekonomi antarkabupaten tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Barat masih bersifat heterogen. Kabupaten yang memiliki sektor basis lebih beragam dan didukung oleh sektor industri maupun jasa cenderung memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang lebih dinamis dibandingkan kabupaten yang masih bergantung pada sektor primer tradisional. Variasi struktur ekonomi tersebut secara tidak

langsung memengaruhi kemampuan daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat kapasitas fiskal wilayah.

Dalam konteks ketimpangan pembangunan, keberadaan sektor basis memiliki hubungan yang erat dengan perbedaan tingkat perkembangan ekonomi antarwilayah. Kabupaten yang memiliki sektor unggulan dengan produktivitas dan nilai tambah tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan wilayah yang masih didominasi oleh sektor dengan produktivitas relatif rendah. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi aktivitas ekonomi menjadi tidak merata antarkabupaten sehingga mendorong munculnya disparitas pembangunan regional.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal perlu menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Barat, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Kasus et al., 2025) yang mengatakan perlunya perumusan kebijakan pembangunan berbasis potensi lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Diversifikasi ekonomi daerah melalui penguatan sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa juga perlu dilakukan secara lebih merata agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Selain itu, peningkatan konektivitas wilayah, pembangunan infrastruktur pendukung, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia juga diperlukan untuk memperkuat transformasi struktur ekonomi daerah menuju pembangunan wilayah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

5. Implikasi Kebijakan Pembangunan Wilayah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antarkabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dipengaruhi oleh perbedaan tingkat perkembangan ekonomi, struktur sektor unggulan, kualitas sumber daya manusia, serta kapasitas pembangunan masing-masing wilayah. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah perlu

dirumuskan melalui pendekatan yang lebih terarah dan berbasis karakteristik wilayah agar proses pembangunan regional dapat berlangsung secara lebih merata dan berkelanjutan.

Kabupaten Mamuju sebagai wilayah yang tergolong maju dan tumbuh cepat perlu diarahkan sebagai pusat pertumbuhan regional di Provinsi Sulawesi Barat. Penguatan fungsi wilayah ini dapat dilakukan melalui pengembangan sektor jasa, perdagangan, administrasi pemerintahan, dan infrastruktur perkotaan yang mampu menciptakan keterkaitan ekonomi dengan wilayah sekitarnya. Selain itu, peningkatan konektivitas antarwilayah perlu diperkuat agar aktivitas ekonomi yang berkembang di pusat pertumbuhan dapat memberikan efek penyebaran pembangunan terhadap kabupaten lain di sekitarnya.

Kabupaten Pasangkayu yang memiliki keunggulan pada sektor perkebunan dan industri pengolahan memerlukan kebijakan pembangunan yang berfokus pada penguatan hilirisasi komoditas unggulan daerah. Pengembangan agroindustri berbasis sumber daya lokal menjadi penting untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat daya saing ekonomi regional. Selain itu, peningkatan investasi sektor produktif dan penguatan infrastruktur pendukung distribusi hasil produksi perlu dilakukan untuk mempercepat transformasi ekonomi wilayah.

Kabupaten Majene dan Polewali Mandar sebagai wilayah yang tergolong potensial berkembang memerlukan strategi pembangunan yang diarahkan pada penguatan sektor perdagangan regional, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan konektivitas ekonomi antarwilayah. Pengembangan sektor ekonomi berbasis agribisnis dan jasa lokal juga perlu diperkuat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan mempercepat pertumbuhan wilayah secara lebih inklusif.

Sementara itu, Kabupaten Mamasa yang masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas dan kapasitas ekonomi membutuhkan prioritas kebijakan pada pembangunan

infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sektor pertanian berbasis potensi lokal. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan pembangunan wilayah dan mengurangi keterisolasian ekonomi daerah.

Kabupaten Mamuju Tengah memerlukan strategi pembangunan yang berorientasi pada diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian produktif, pengembangan industri pengolahan skala lokal, serta peningkatan investasi pada sektor-sektor produktif daerah. Diversifikasi struktur ekonomi diperlukan agar wilayah tidak hanya bergantung pada sektor primer, tetapi juga mampu mengembangkan aktivitas ekonomi dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Secara umum, pengurangan ketimpangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat memerlukan kebijakan pembangunan wilayah yang tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan potensi ekonomi, karakteristik geografis, dan tingkat perkembangan masing-masing kabupaten. Pendekatan pembangunan berbasis karakteristik wilayah tersebut diharapkan mampu memperkuat pemerataan pembangunan, meningkatkan keterkaitan ekonomi antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antarkabupaten di Provinsi Sulawesi Barat masih dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas ekonomi, struktur sektor unggulan, dan kualitas pembangunan manusia antarwilayah. Meskipun tingkat ketimpangan cenderung mengalami penurunan selama periode pengamatan, distribusi aktivitas ekonomi regional masih terkonsentrasi pada kabupaten tertentu yang memiliki akses infrastruktur, fungsi pelayanan, dan aktivitas ekonomi yang lebih berkembang.

Hasil klasifikasi wilayah memperlihatkan bahwa dinamika pembangunan antarkabupaten belum berlangsung secara seimbang. Kabupaten dengan struktur

ekonomi yang lebih terdiversifikasi dan didukung sektor jasa, perdagangan, maupun industri menunjukkan kemampuan pertumbuhan yang relatif lebih kuat dibandingkan wilayah yang masih bergantung pada sektor primer tradisional. Kondisi tersebut menegaskan bahwa karakteristik ekonomi lokal menjadi faktor penting dalam menentukan posisi perkembangan suatu wilayah dalam struktur pembangunan regional.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kapasitas masyarakat menjadi elemen penting dalam memperkuat produktivitas ekonomi dan mempercepat transformasi pembangunan wilayah. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dan penguatan investasi daerah memerlukan pengelolaan yang lebih efektif agar mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih merata antarkabupaten.

Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Barat perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih berbasis karakteristik daerah. Pengembangan sektor unggulan lokal, peningkatan konektivitas wilayah, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta diversifikasi struktur ekonomi menjadi langkah penting untuk mendorong pembangunan regional yang lebih inklusif, seimbang, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Alfayed, M. F., Andiny, P., Rizal, Y., Safuridar, S., Studi, P., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2025). *Pengaruh Belanja Modal , dan Indeks Pembangunan Manusia , Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*.
- Andari, Y. (2020). Analysis Of Financial and Income Disparity Between Rural-Urban Areas In Indonesia. *Eko-Regional Jurnal Pengembangan Ekonomi Wilayah*, 15(1), 12–24. <https://doi.org/10.20884/1.erjpe.2020.15.1.1441>
- Arifin, Z. . (2009). Analisis Perbandingan

- Perekonomian Pada Empat Koridor Di Propinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(1), 77. <https://doi.org/10.22219/jep.v7i1.3585>
- Arsyanti, R. A., & Nugrahadi, T. (2021). Analisis Konvergensi Ekonomi Pada Level Kawasan Dan Nasional Serta Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2020(1), 717–727. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.481>
- Azalia, D. B. (2026). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI USIA*. 03, 20–25.
- Azim, A. N., Sutjipto, H., Adi, R., Ginanjar, F., & Sultan. (2022). *Pendapat Becker*. 2(1), 1–16.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. (2025). *Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat Tahun 2024*. <https://sulbar.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/1279/pertumbuhan-ekonomi-sulawesi-barat-tahun-2024-4-76-persen-c-to-c-.html>
- Fitriani, F., & Hukmi, A. (2025). Kajian Peran Infrastruktur dalam Pengembangan Ekonomi Wilayah. *Economica Insight*, 2(1), 43–52. <https://doi.org/10.71094/ecoin.v2i1.204>
- Glasson, J. (1974). An introduction to regional planning; concepts, theory and practice. In *Journal Hutchison*. Hutchinson Educational. https://books.google.com/books/about/An_Introduction_to_Regional_Planning.html?hl=id&id=NGOIQgAACAAJ
- Goschin, Z. (2019). Specialisation Vs Diversification. Which One Better Upholds Regional Resilience to Economic Crises? *Journal of Social and Economic Statistics*, 8(2), 11–23. <https://doi.org/10.2478/jses-2019-0002>
- Haryana, A. (2026). *Komoditas Strategis dan Hilirisasi Pertanian sebagai Pilar Transformasi Ekonomi Indonesia*. IX(1), 53–72.
- Hendarmin, H. (2019). Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, dan Modal Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antarkabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(2), 245. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i2.11186>
- Hidayadi, T., & Niam, A. M. (2022). Analisis Disparitas Ekonomi Wilayah Jabodetaek Pada Masa Pandemi Covid 19. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 6(1), 117–130. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i1.1301>
- Innez Dara Puspita, Asriani Asriani, & Yulistia Devi. (2025). Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri, Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Disparitas Pendapatan di Sumbagsel dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 3(4), 113–130. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i4.3583>
- Kasus, S., Banda, K., Langsa, K., & Lhokseumawe, K. (2025). *Analisis Potensi Sektor Unggulan Diwilayah Provinsi Aceh dengan Menggunakan Metode Location Quotient (LQ)*. September.
- Madany, N., & Rais, Z. (2022). *Regresi Data Panel dan Aplikasinya dalam Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Idx Lq45 Bursa Efek Indonesia*. 4(2), 79–94. <https://doi.org/10.35580/variansiunm28>
- Maharani, A. (2025). *Analisis Kesejahteraan dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Terhadap Tingkat Pengangguran di Kepulauan Bangka Belitung*. 10(1), 514–526.
- Mallarangang, I. (2018). Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2011-2015. *Jurnal Kritis*, II(1), 1–38.
- Manik, T. P., Syaputra, I., & Dalimunthe, M. B. (2023). *Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan*. 13(1), 1–10.
- McCann, P. (2022). Place-based policy and regional development. *Regional Studies*, 56(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/00343404.2021.1908384>
- Raafi'i, A., Hakim, D. B., & Putri, E. I. K. (2018). Ketimpangan Pembangunan

- Antarwilayah Pengembangan di Provinsi Papua Barat [Inequality of Development Between Regions of Development in West Papua Province]. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 2(3), 244.
- Saskia, S. M. (2026). *Peran Instrumen Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten / Kota di Jawa Barat*. 5(1), 8195–8203.
- Sinaga, R., Simanullang, T., Tampubolon, C., Hutasoit, B., & Perwira, D. (2025). *Pengaruh Potensi Sumber Daya Alam dan Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Palangkaraya*. 5(2020), 10269–10281.
- Susilowati, & Putri, K. A. S. (2024). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 257–261.
- Syafrizal. (2008). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Baduose Media.
- Tommy Firman. (2015). No TiDemographic Patterns of Indonesia's Urbanization, 2000–2010: Continuity and Change at the Macro Level. *Demographic Transformation and Socio-Economic Development*, 5. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24783-0_16
- Vidrizza, U., Ghania, S., & Khatimah, K. (2026). *Pemetaan Keterkaitan Spasial dan Interaksi Wilayah sebagai Dasar Penataan Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Bogor Mapping Spatial Linkages and Regional Interactions as the Basis for Structuring Growth Centers in Bogor Regency*. 8(1), 51–61.
- Yusuf, R. F., Hidayat, S., Rohman, A. F., Rizqiyanto, N., & Yusuf, M. R. (2025). Implikasi Pengelolaan Kawasan Aglomerasi dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta terhadap Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 4(2), 329–358. <https://doi.org/10.14421/455xj860>
- Zaman, M. Q. (2024). *Jurnal Ekonomi-Qu TERHADAP EKONOMI REGIONAL DI*. 2(2), 42–48.